

PERGOLAKAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PEREBUTAN KEKUASAAN

Studi Atas Peta Kekuatan Politik Islam
di Indonesia Pada Era Reformasi
(Dinamika, Relasi, dan Kontestasi)



IAIN PEKALONGAN



Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Pemikiran Politik Islam IAIN Pekalongan

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.



IAIN PEKALONGAN

Pidato
Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam bidang Ilmu Pemikiran Politik Islam pada
Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

PERGOLAKAN PARTAI POLITIK ISLAM
DALAM PEREBUTAN KEKUASAAN
Studi atas Peta Kekuatan Politik Islam di
Indonesia pada Era Reformasi
(Dinamika, Relasi, dan Kontestasi)

Oleh:

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.
NIP 19650621 199203 1 002

Disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka
Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan

12 Maret 2022

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Yang terhormat:

- Rektor dan para pembantu rektor IAIN Pekalongan,
- Ketua, Sekretaris, dan para anggota senat IAIN Pekalongan,
- Para Dekan, para pembantu Dekan dan para Kajor di lingkungan IAIN Pekalongan,
- Direktur, Wakil Direktur dan para Kaprodi di Pascasarjana, IAIN Pekalongan,
- Kepala Biro, para Kabag, para Kasi, dan para kepala Lembaga di IAIN Pekalongan,
- para ulama, para tuan guru, para *masyāyikh*, para ustādz,
- Segenap sivitas akademika dan keluarga besar IAIN Pekalongan, serta
- Segenap tamu undangan, baik yang hadir secara offline maupun yang melalui online yang berbahagia.

Al-hamdulillāh, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang memberikan kepada kita limpahan nikmat. Semoga kita semua dapat mensyukuri nikmat-Nya dan menjalani sisa usia kita di jalan yang diridhai-Nya. *Āmīn Yā Rabbal ‘ālamīn*.

Sebagai bagian dari kewajiban seorang dosen yang memperoleh jabatan tertinggi dalam dunia akademik, ijinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang saya beri judul, **“Pergolakan Partai Politik Islam dalam Perebutan Kekuasaan: Studi atas Peta Kekuatan Politik Islam di Indonesia Era Reformasi.”** Judul ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa partai-partai politik Islam di Indonesia tidak pernah memperoleh kemenangan dalam setiap pemilu,

sehingga tidak pernah secara mutlak berkuasa. Meskipun jumlah umat Islam mendekati 90 % dari rakyat Indonesia, tetapi ternyata tidak semua umat Islam Indonesia menyalurkan aspirasi politik mereka melalui partai-partai Islam. Pemilu 1955 dimenangkan oleh PNI, pemilu di era Orde Baru dimenangkan oleh Golkar, Pemilu 1999 (PDIP), Pemilu 2004 (Partai Golkar), Pemilu 2009 (Partai Demokrat), Pemilu 2014 dan 2019 (PDIP). Ini berarti partai-partai politik Islam tidak pernah memperoleh kemenangan. Padahal pada umumnya, orang memilih partai atau tokoh didasarkan pada ikatan agama, organisasi, atau daerah, namun untuk kasus di Indonesia tidak lah demikian.¹

Kalau hasil Pemilu pertama tahun 1955 kita gunakan sebagai indikator, perolehan kursi DPR oleh partai-partai politik Islam seluruhnya hanya sekitar 45 % dari seluruh kursi. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi parlementer, kalau partai-partai politik Islam bersatu sekalipun tidak mungkin memerintah secara mutlak, karena mereka tidak memiliki mayoritas di DPR. Lantas, bagaimana dengan era reformasi ketika banyak muncul partai politik Islam? Bagaimana dinamika perebutan kekuasaan oleh partai politik Islam di era reformasi?

Perebutan kekuasaan tidak dapat terlepas dari jumlah suara warga pemilih. Sedikit-banyaknya aspirasi rakyat akan berpengaruh secara langsung terhadap capaian kursi para anggota dewan dari masing-masing partai. Karena itu, perlu ditelaah lebih lanjut beberapa aspek yang berpengaruh terhadap pemilih, yang Menurut Miriam Budiharjo, sekurang-kurangnya ada empat faktor, yaitu: (1) kekuasaan, yakni cara mencapai suatu hal yang diinginkan melalui berbagai sumber pada kelompok masyarakat; (2) kepentingan, yaitu tujuan yang dikejar oleh kelompok politik;

1. Muhadam Labodo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, Isu Strategis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 98.

(3) kebijakan, yaitu hasil kekuasaan dan kepentingan yang biasanya dibentuk dalam wujud perundang-undangan; dan (4) budaya politik, yaitu orientasi subjektif individu terhadap sistem politik.²

Karena itu, sebelum menjawab pertanyaan mengapa parpol Islam tidak mampu menjadi pemenang dalam pemilu legislatif, akan diurai terlebih dahulu latar belakang dari masing-masing partai, termasuk basis massa pendukungnya. Kemudian arah kebijakan parpol juga akan ditelaah untuk mengetahui bagaimana konsistensi parpol terhadap nilai-nilai dan visi-misi yang dianut. Dinamika hubungan antara parpol Islam dengan partai lain juga akan dikemukakan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pola relasi serta alasan kontestasi tersebut.

Partai Politik Islam: Pengertian dan Indikatornya

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks partai politik Islam, maka dapat diartikan bahwa partai tersebut menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan ideologisnya.³

Indikator yang paling jelas dari partai politik Islam dapat dilihat dari berbagai ide dan gagasannya yang lebih menonjolkan sisi-sisi keislaman, di samping tokoh-tokohnya berasal dari kalangan umat Islam yang vokal dalam

-
2. Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 49.
 3. Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, Third Edition, Oxford: Oxford University Press, 1998, hlm. 59.

menyuarakan nilai ajaran agamanya. Beberapa di antara partai tersebut secara jelas menyebutkan bahwa asas yang dijadikan bangunan partai berlandaskan ajaran Islam atau memiliki visi untuk memperjuangkan nilai dan cita-cita islami.⁴

Menurut Evans, sebagaimana dikutip Mayrudin, pada garis ideologis, spektrum sosial Indonesia terbagi atas kalangan “kiri” atau sekuler dan “kanan” atau agama, dengan pembeda paling dasar bagaimana menempatkan agama di hadapan negara. Kalangan sekuler adalah keseluruhan entitas yang menolak pengkhususan terhadap entitas agama, khususnya Islam, dalam hubungannya dengan negara. Sementara itu, kalangan agama adalah mereka yang mendukung transformasi agama dalam negara.⁵

Di antara contoh partai politik yang secara eksplisit menjadikan ajaran Islam sebagai bagian dari asas, visi-misi, maupun prinsip perjuangannya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP),⁶ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),⁷

-
4. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 60.
 5. Yeby Ma’asan Mayrudin, “Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014”, *Journal of Governance*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 170.
 6. Dalam laman resmi PPP, disebutkan visinya: "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman." Lihat <https://ppp.or.id/visimisi>, diakses pada 31 Agustus 2020 jam 10.44 WIB.
 7. Visi PKB antara lain: Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. Adapun asasnya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial

Partai Keadilan Sejahtera (PKS),⁸ dan Partai Bulan Bintang (PBB).⁹ Adapun Partai Amanat Nasional (PAN) tidak

bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljamaah. Lihat <https://www.pkb.id/page/visi-misi/> dan <https://www.pkb.id/page/asas-prinsip/>, diakses pada 31 Agustus 2020 jam 11.05 WIB. Cita-cita dan visi partai ini juga dapat dilihat dari bagian terakhir isi deklarasi yang disampaikan oleh para deklarator yang beranggotakan para kyai sepuh kharismatik, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi. Bagian terakhir tersebut berbunyi: *"Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestariannya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridloi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berakhlakul karimah. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didirikanlah PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka."* Lihat Moch. Eksan, *Kiai Kelana: Biografi Kiai Muchith Muzadi*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2000, hlm. 162. Baca pula teks deklarasinya pada: pkb.id/page/naskah-deklarasi/ diakses pada Rabu, 28 November 2018 pada jam 11.31 WIB.

8. Dalam AD/ART PKS pada Bab 1 Pasal 2, disebutkan bahwa PKS merupakan partai berasaskan Islam. Adapun misinya, sebagaimana termaktub dalam Bab 2 Pasal 6 adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, hlm. 2-3. Diunduh dari laman resmi PKS, <https://pks.id/content/ad-art-pks>, pada 31 Agustus 2020 jam 10.41 WIB.
9. Dalam laman resmi PBB, disebutkan visinya: Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami, tegakkan Keadilan & Kepastian Hukum, bela Umat, Bela Ulama, Bela Islam, Bela Rakyat, Bela NKRI. Adapun misinya: Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertaqwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kehidupan demokratis berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan turut

menyebutkan secara jelas dan eksplisit mengenai asas dan dasar ideologi pergerakannya yang berlandaskan Islam, namun PAN dalam AD/ART-nya menyatakan bahwa: “Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.” Dengan demikian, secara implisit PAN menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai fondasi pergerakan dan ideologi politiknya.¹⁰

Pemetaan ideologi dan identifikasi parpol-parpol yang dilakukan oleh Mayrudin jika dikhususkan pada parpol Islam adalah sebagai berikut:¹¹

No	Nama Partai	Asas/Ideologi	Identifikasi	Positioning
1	PPP	Islam	Islam	Kanan
2	PKB	Pancasila dengan prinsip <i>ahlus sunnah wal jama'ah</i>	Islam	Kanan
3	PAN	Pancasila dan berakar pada moral agama	Islam	Kanan
4	PKS	Islam	Islam	Kanan
5	PBB	Islam	Islam	Kanan

Dalam konteks ini, pemetaan ideologi dan identifikasi parpol yang dilakukan oleh Mayrudin sudah tepat karena

menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Lihat <https://www.partaibulanbintang.or.id/visi-dan-misi-partai.html>, diakses pada 31 Agustus 2020 jam 10.28 WIB.

10. Yeby Ma'asan Mayrudin, “Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014”, *Journal of Governance*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 173.
11. Yeby Ma'asan Mayrudin, “Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014”, *Journal of Governance*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 172.

mengklasifikasikan lima parpol berikut sebagai parpol Islam, yakni PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB.¹² Mengacu pada pembagian di atas, maka yang dibahas secara spesifik dalam orasi ilmiah ini adalah lima partai tersebut.

Akar Sejarah Partai Politik Islam

Menilik sejarah pendirian dan *background* para *founders*-nya, partai-partai politik Islam memiliki beragam akar ideologis yang selanjutnya menentukan cita-cita dan arah kebijakan partai. Latar historis berdirinya parpol-parpol Islam adalah sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP lahir pada era Orde Baru, saat pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai fusi banyak partai ke dalam 3 partai, yakni PPP, Golkar, dan PDI. Dari segi asal muasalnya, PPP sendiri merupakan gabungan dari empat partai politik Islam, yaitu: Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara itu, lima partai lain, yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Partai Katolik, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).¹³

Secara historis, keberadaan PPP merupakan penerus estafet perjuangan politik umat Islam di Indonesia. Sejak berdirinya sampai reformasi bergulir tahun 1998, PPP adalah wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang berjuang

12. Yeby Ma'asan Mayrudin, "Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014", *Journal of Governance*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 172.

13. Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, Yogyakarta: LKiS, 2009, hlm. 123.

untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari latar belakang kelahirannya, PPP yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 merupakan hasil fusi politik partai-partai Islam yang ada saat itu, sekaligus sebagai kelanjutan dari perjuangan politik Islam sejak era kemerdekaan, yakni sejak lahirnya organisasi pergerakan Islam modern, seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Syarikat Islam (1912), lalu berubah menjadi Partai Syarikat Islam (1920), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Majelis Islam A'la Indonesia – MIAI- (1937), Masyumi (1943) dan lain-lain.¹⁴

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB lahir pada 23 Juli 1998 di Jakarta, pada era reformasi, tidak lama setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Meski sempat terdapat usulan tiga nama sebelum nama PKB dipilih, yaitu Partai Nahdlatul Ummat, Partai Kebangkitan Umat, dan Partai Kebangkitan Nasional, namun tiga nama tersebut tidak diambil oleh Abdurrahman Wahid. Nuansa keislaman itu dikurangi secara berarti dengan tujuan membuat PKB bercitra diri sebagai partai kebangsaan dan partai yang terbuka.¹⁵

Pendirian PKB oleh NU sebagai upaya untuk mengatasi dua kecenderungan besar yang muncul di NU pasca Orde Baru. Satu kelompok menghendaki NU mendirikan partai politik, sementara kelompok lainnya menginginkan NU tetap menjadi ormas keagamaan. Jalan keluarnya adalah NU membidani

14. <https://www.pppjatim.or.id/khitthah-dan-program-perjuangan/>, diakses pada 16 September 2020, pukul 16.35 WIB.

15. Salahuddin Wahid, *Menggagas Peran Politik NU*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002, hlm. 66.

pendirian partai, dalam hal ini PKB, untuk fasilitas dan artikulasi kepentingan warga NU tanpa menjadikan NU sebagai partai politik. Dengan demikian, NU dan PKB memiliki relasi historis, kultural, dan aspiratif. Historis artinya pembentukan PKB bertalian erat dengan NU. Kultural berarti perjuangan PKB harus memperhatikan lingkungan kultural khas yang dianut NU, yaitu lingkungan yang dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan Islam *ahlussunnah wal jama'ah*. Sedangkan aspiratif artinya PKB berkewajiban untuk memerjuangkan cita-cita politik yang dimiliki warga NU.¹⁶

Terlebih lagi, selama era Orde Baru, pemerintah dirasa kurang memihak terhadap aspirasi umat Islam, khususnya NU. Maka, momentum reformasi menjadi kesempatan emas untuk mewujudkan kehendak yang lama terpendam tersebut. Bahkan, meski baru saja berdiri, PKB berhasil mengantarkan ketua umumnya, Abdurrahman Wahid, menjadi Presiden RI keempat, meski tanpa mendulang suara terbanyak.¹⁷

16. Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfare, 2012, hlm. 142.

17. Pada 1998, kekuatan nasionalis-sekular yang selama pemerintahan Orde Baru mengalami tindakan represif kemudian bangkit. Megawati, yang sejak pertengahan 1990-an memobilisasi gerakan perlawanan terhadap Orde Baru, kemudian mendirikan PDI Perjuangan. Pada Pemilu 1999, PDIP di bawah komando Megawati langsung mendapatkan suara 34% dan memenangkan pemilu pada saat itu. Partai Golkar yang menjadi pesakitan selama aksi reformasi ternyata masih mendapatkan kepercayaan dari pemilih dan menduduki peringkat kedua dalam pemilu, yaitu dengan 22,4% suara. Sementara partai-partai Islam marak bermunculan. Di antara yang utama adalah PPP, PAN, PKB, PBB, dan PK (kemudian menjadi PKS). Meski meraih status sebagai pemenang pemilu, PDIP gagal menempatkan ketua umumnya, Megawati, sebagai presiden. Hal tersebut disebabkan sejumlah partai Islam yang didukung oleh Partai Golkar menggalang kekuatan bersama yang mengusung Abdurrahman Wahid, dari PKB, sebagai presiden. Megawati kemudian didaulat menjadi wakil presiden. Alasan penjegalan Megawati bernuansa agama. PPP mengatakan bahwa presiden dari kalangan perempuan tidak dapat diterima dalam ajaran Islam sebab dalam hadis dikatakan pemimpin laki-laki harus diutamakan. Tetapi di balik itu, kekhawatiran munculnya kekuatan kiri seiring berkuasanya PDIP

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS secara historis berhubungan langsung dengan pendahulunya, Partai Keadilan (PK) yang berdiri pada 20 April 1998. Kelahiran PKS berkaitan erat dengan gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan yang muncul sebagai tanggapan atas tekanan politik pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Gerakan ini ditandai dengan mulai maraknya kegiatan kajian Islam dan meluasnya penggunaan jilbab di kampus-kampus sekuler Indonesia pada era 1980-an. Secara ideologis, PK lahir dari gabungan beberapa elemen, yaitu (1) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dengan tokoh utama Muhammad Natsir, (2) aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Rohis, (3) alumni perguruan tinggi, utamanya dari Timur Tengah, (4) aktivis ormas Islam, dan (5) dai lulusan pesantren.¹⁸

PK memiliki sebuah tujuan yang dirumuskan dalam kalimat “*al-Islam huwa ad-din wa ad-dawlah*”.¹⁹ Meski demikian, PKS yang merupakan hasil transformasi dari PK, tidak menyebutkan adanya cita-cita mendirikan negara Islam. Bagi PKS, yang utama adalah menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan warga.²⁰ Bagi PKS, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi sesama *insan* dan semua

juga menjadi alasan kuat. Sejak tahun 1994, terdapat tuduhan kepada Megawati bahwa partai PDI telah diinfiltrasi oleh elemen-elemen komunis. Lihat Stephen Eklof, *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order (1986-1998)*, London: Routledge, 2004.

18. Ach. Basyir, “Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 243.
19. Syamsul Balda, *Politik Dakwah Partai Keadilan*, Jakarta: DPP Partai Keadilan, 2000.
20. Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Kontemporer*, Jakarta: Teraju, 2004, hlm. 232-234.

golongan, guna mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bermartabat.²¹

Meskipun memang secara pemikiran politik, PKS menolak pemisahan agama dan negara (sekularisme) di Indonesia. Sekularisme dianggap tidak relevan, karena Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut PKS, Indonesia adalah NKRI yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Secara formal kepartaian, PKS berusaha menyesuaikan diri dengan norma kehidupan tata negara, tetapi simbol-simbol nasionalisme (Pancasila, UUD 1945) tidak tampak dalam platform.²²

Di Pemilu 1999 ketika PK hanya mendapat 1,36% suara dari perolehan suara nasional dan memperoleh tujuh kursi di DPR, sehingga tidak mencapai syarat ambang batas parlemen 2%, maka untuk melanjutkan kiprahnya di Pemilu 2004, partai ini berganti nama dan lambang menjadi PKS. Dengan latar belakang pendirinya yang sebagian besar adalah anak muda terdidik, PKS meraup dukungan paling banyak di perkotaan. Dalam Pemilu 2004, partai ini mendapat 7,3% dukungan suara nasional, melonjak dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya yang hanya 1,36%. PKS menempatkan tokoh-tokoh muda sebagai kandidat alternatif untuk diusung sebagai gubernur, bupati, dan wali kota melalui pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar sejak 2005. PKS tampil sebagai peraih suara terbanyak keempat hasil Pemilu 2009 seiring meluasnya sebaran pemilih PKS. Eskalasi kemenangan yang diraih PKS dalam pilkada serentak yang digelar sejak 2015 baik lewat jalan koalisi

21. Herdi Sahrasad, *PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan*, Jakarta: PSIK Paramadina, 2008, hlm. 35.

22. Galang Gerald, "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI, dan Islam Fundamentalisme di PKS", *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 152.

maupun mengusung kadernya sendiri telah mematahkan dominasi Golkar dan PDI Perjuangan.

Partai ini secara rutin terlibat dalam program pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan. Dengan sistem kaderisasi yang teratur, PKS membangun militansi kadernya. Kader membiayai keterlibatan diri mereka dalam agenda politik dan tidak bergantung pada figur. PKS secara konsisten memberikan dukungan bagi perjuangan umat Islam di seluruh dunia lewat lobi di parlemen, demonstrasi, maupun penggalangan dana. Dalam setiap demonstrasi maupun kampanye mereka, PKS dianggap "mendatangkan contoh" mengerahkan massa dalam jumlah banyak dengan tertib dan aman.

4. Partai Amanat Nasional (PAN)

Kelahiran PAN tidak dapat dilepaskan dari sosok Amien Rais, tokoh reformasi 1998. Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru. Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang merupakan salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, bersama dengan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet kemudian membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN).²³

Awalnya partai politik yang berasaskan Pancasila ini sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB) namun akhirnya berubah menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor. PAN didirikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Amien Rais,

23. <http://pan.or.id/sejarah-pan/>, diakses pada 30 September 2020, jam 15.11 WIB.

Faisal Basri, M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Rizal Ramli, Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Toety Heraty, Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lain-lainnya. Kemudian deklarasinya dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta.²⁴

Meskipun tidak menyatakan secara eksplisit bahwa PAN merupakan partai yang berada di bawah garis komando Muhammadiyah, keberadaan Amien Rais sebagai inisiator dan *founder* sudah cukup sebagai isyarat bahwa partai ini mengandalkan basis massa dari kalangan Muhammadiyah. Melihat kedekatan historis antara PAN dan Muhammadiyah, tampaknya agak sulit bagi partai ini untuk memperluas jaringan pendukungnya hingga ke kalangan tradisionalis seperti warga NU.

5. Partai Bulan Bintang (PBB)

Embrio kelahiran PBB telah ada jauh sebelum era reformasi. Yakni, bermula dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang berisi para tokoh pendukung partai politik Islam Masyumi. Dalam perjalanan selanjutnya, kemudian dibentuk Badan Koordinasi Ummat Islam (BKUI) yang menghimpun dukungan dari berbagai lembaga, di antaranya ICMI, KISDI, PERSIS, PERTI, Al-Irsyad, HMI, PII, PPMI, dan lain-lain.²⁵

Melalui Komisi Politik BKUI inilah akhirnya disepakati AD/ART partai dengan nama Partai Bulan Bintang. Kesepakatan ini langsung diikuti dengan penandatanganan ikrar berdirinya Partai Bulan Bintang pada tanggal 17 Juli 1998. Pada rapat yang diselenggarakan di kediaman Dr. Anwar Harjono, 23 Juli 1998, Tim Partai menyepakati Prof. Dr. Yusril

24. <http://pan.or.id/sejarah-pan/>, diakses pada 30 September 2020, jam 15.11 WIB.

25. Hairus Salim (ed.), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999, hlm. 56.

Ihza Mahendra sebagai pemimpin partai. Pada tanggal 26 Juli 1998, dengan mengambil tempat di halaman Masjid Agung Al-Azhar, partai tersebut dideklarasikan.²⁶

Secara ideologis, basis massa PBB adalah pendukung Partai Masyumi yang banyak berasal dari kalangan orang tua. Sementara dari kalangan muda sendiri, terutama mereka yang tidak banyak membaca sejarah perjuangan Masyumi serta ideologinya, tidak banyak mengenal gagasan dan cita-cita yang ingin diperjuangkan partai ini. Sehingga, sulit bagi PBB untuk memperluas basis massanya di luar simpatisan Masyumi, kecuali PBB membuat program yang secara efektif dan efisien mampu mengenalkan gagasan pendiri Masyumi.

Arah Kebijakan Partai Politik Islam

Keberhasilan setiap bangsa dalam mempertahankan eksistensi dan meraih kejayaan dirinya tidak hanya ditentukan oleh besarnya akumulasi modal yang dimiliki (berupa sumber daya alam, cadangan finansial, sumber daya manusia maupun modal sosial (*social capital*) yang dimilikinya, tetapi juga kemampuan bangsa yang bersangkutan dalam mengelola dan mendayagunakan semua modal yang dimilikinya itu secara sinergis untuk mendorong kemajuan dan meraih cita-cita kolektif yang diinginkannya.

Meski menyatakan dalam visi-misi, tujuan, dan/atau cita-citanya bahwa asas yang dipakai adalah Islam, ideologi parpol Islam satu dengan yang lain mempunyai perbedaan yang cukup kentara. Terutama bila melihat basis massa dan organisasi masyarakat (ormas) yang menjadi latar kelahiran parpol tersebut, corak ideologi masing-masing parpol Islam akan semakin jelas terlihat, yang selanjutnya berpengaruh terhadap arah kebijakan partai. Berikut ini

26. Hairus Salim (ed.), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999, hlm. 58.

arah kebijakan parpol-parpol Islam yang pada prinsipnya berkesesuaian dengan ideologi partai:

1. **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Sejak berdirinya 5 Januari 1973, PPP berjuang membawa aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada era Orde Baru, PPP memperjuangkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Pada era itu PPP selalu mendengungkan pembatasan era jabatan presiden tak lebih dari dua periode agar sirkulasi kepemimpinan berjalan secara alamiah, demokratis, dan yang terpenting menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.²⁷

Di antara persoalan yang menjadi konsen PPP antara lain pengembangan ekonomi kerakyatan, penegakan hukum dan keadilan, pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), otonomi daerah, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pemberantasan perjudian (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah/SDSB), serta penghapusan asas tunggal dan indoktrinasi melalui Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4).²⁸

2. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

Implementasi ideologi Aswaja, tradisi pesantren dengan semangat kebangsaan cukup terasa, terutama dalam konteks penentuan arah kebijakan partai. *Mabda Siyasi* partai menjadi bukti otentik komitmen kebangsaan dalam kerangka pemikiran Islam tradisional. Sementara perilaku politik kader PKB secara umum juga memperlihatkan pembelaan dalam soal-soal itu. Beberapa kalangan mengakui bahwa dalam perjalanannya PKB telah menjelma menjadi

27. <https://www.pppjatim.or.id/khitthah-dan-program-perjuangan/>, diakses pada 16 September 2020, pukul 16.35 WIB.

28. <https://www.pppjatim.or.id/khitthah-dan-program-perjuangan/>, diakses pada 16 September 2020, pukul 16.35 WIB.

sebuah ikon dan simbol partai yang membela pluralisme, demokrasi dan hak-hak minoritas.²⁹

Dalam soal menjadikan ideologi sebagai sebuah tuntunan pembuatan kebijakan, bagi beberapa kalangan, PKB termasuk partai yang berhasil menjalankannya. Dalam perilaku di parlemen, Fraksi PKB memperlihatkan konsistensi dalam memperjuangkan ideologi partai. Ali Masykur Musa, sebagaimana ditulis Firman Noor, mengatakan bahkan implementasi ideologi Aswaja dalam nuansa kebangsaan telah masuk dalam ranah perjuangan anggota FPKB dalam menyukseskan anggaran pro-rakyat kecil.³⁰

Salah satu indikasi kuat yang membuktikan hal tersebut adalah jabatan para politisi PKB yang punya kaitan langsung dengan elemen rakyat menengah ke bawah. Pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, misalnya, Hanif Dhakiri yang notabene berasal dari PKB ditunjuk menjadi Menteri Tenaga Kerja. Di periode kedua, wakil PKB lainnya, Ida Fauziah, juga ditunjuk menduduki posisi yang sama. PKB juga mendapat kursi pimpinan DPR sebagai wakil ketua bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.³¹ Jabatan yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat ini menunjukkan adanya upaya PKB dalam melakukan pendekatan serta perjuangan terhadap kebutuhan hidup warga.

3. Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN termasuk partai yang cukup konsen dalam merespons isu-isu yang berurusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan isu keagamaan. Yang terkini, PAN mengusulkan agar pimpinan DPR mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Program Legislatif Nasional

29. Firman Noor, "PKB, Kegagalan Pelembagaan Shared Values dan Dampaknya", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 9.

30. Firman Noor, "PKB, Kegagalan Pelembagaan Shared Values dan Dampaknya", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 9-10.

31. Tim Kajian Lanskap Indonesia, *Manifesto PKB: Melayani Ibu Pertiwi*, t.tp., t.th., hlm. 47.

(prolegnas). RUU HIP sendiri telah memicu perdebatan di tingkat nasional karena disinyalir mereduksi pemaknaan terhadap Pancasila. Di samping itu, banyak ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, dan yang lainnya menolak RUU HIP.³² Dalam konteks ini, langkah yang diambil oleh PAN dinilai sudah tepat dan sejalan dengan keinginan sebagian masyarakat yang menolak HIP.

Fraksi PAN juga mengusulkan penghapusan Pasal 150 ayat (3) dalam Bab X tentang Investasi Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional dalam RUU Cipta Kerja. Klausul itu dinilai bisa berpotensi menimbulkan kerugian, sebab aset negara yang ada di bawah Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dapat dialihkan atau dipindahtangankan sebagai modal perusahaan patungan antara lembaga tersebut dengan swasta.³³

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk partai yang cukup aktif dalam bersuara di parlemen. Ketika UU ITE masih dalam bentuk rancangan, bersama dengan PAN, PKS mengusulkan beberapa usulan revisi. Usulan itu berkenaan dengan beberapa materi RUU ITE yang berpotensi menjadi pasal karet, yang bisa digunakan untuk menjerat pihak-pihak tertentu. Termasuk di dalamnya terkait pencemaran nama baik, yang sebenarnya sudah ada di KUHP.³⁴

Terkait rancangan undang-undang yang bersinggungan dengan persoalan ideologi, terutama yang dinilai bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman, PKS juga responsif mengawal isu tersebut. Terhadap RUU HIP yang ditolak banyak pihak, namun

32. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200624122551-32-516863/fraksi-pan-desak-pimpinan-dpr-cabut-ruu-hip-dari-prolegnas>, diakses pada 3 Oktober 2020, jam 15.30 WIB.

33. <https://www.acehtrend.com/2020/09/23/dpr-usulkan-hapus-pasal-150-ayat-3-ruu-cipta-kerja-yang-berpotensi-merugikan-keuangan-negara/>, diakses pada 3 Oktober 2020, jam 15.35 WIB.

34. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3164951/progresif-usulan-revisi-ite-dari-fraksi-pan-dan-pks>, diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.20 WIB.

kemudian direncanakan diubah menjadi RUU PIP, PKS bersama PAN juga memberikan kritik tajam terhadap langkah itu. Menurut PKS, cara tersebut tetap akan memunculkan polemik di masyarakat dan tidak menyelesaikan eralah.³⁵ PKS juga mendorong supaya RUU Perlindungan Ulama masuk Prolegnas prioritas. Usulan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah tindak kekerasan yang dialamatkan kepada ulama. Karena itu, PKS memandang persoalan ini cukup urgen untuk dibahas.³⁶

Di luar isu tersebut, PKS juga menolak RUU Cipta Kerja yang memang selama ini memantik perdebatan dan penolakan dari banyak pihak karena dinilai akan merugikan para pekerja.³⁷ Sejalan dengan itu, PKS menyatakan dukungannya terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.³⁸

5. Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengklaim diri atau dapat disebut reinkarnasi Masyumi dan meminjam lambang bulan bintangnya untuk nama partai dalam pemilihan umum 1999 hanya menempati 13 kursi, atau hanya meraih tiga kursi lebih banyak dari ambang penalti threshold. Setelah hampir setengah abad berlalu, kejayaan Masyumi dan wajah Islam modern demokrat yang ditampilkannya secara mengesankan, ternyata tak sanggup lagi

35. <https://nasional.tempo.co/amp/1358595/pks-dan-pan-anggap-usulan-ubah-ruu-hip-ke-ruu-pip-tak-relevan>, diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.25 WIB.

36. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191205061023-32-454286/pks-dorong-ruu-perlindungan-ulama-masuk-prolegnas-prioritas>, diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.25 WIB.

37. <https://fixpadang.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-40797326/ruu-cipta-kerja-ditolak-jadi-uu-oleh-fraksi-pks>, diakses , diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.34 WIB.

38. <https://fraksi.pks.id/2020/07/02/pendapat-akhir-mini-fraksi-pks-dpr-ri-terhadap-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/>, diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.45 WIB.

memikat hati para pemilih dari bilik suara partai-partai nasionalis-sekuler seperti PDIP dan Golkar.³⁹

Dengan hanya bermodal 13 kursi di DPR-RI, upaya Fraksi Bulan Bintang untuk meloloskan keputusan politik memang seringkali mentok. Sebagai contoh, saat Sidang Tahunan (ST) MPR yang dilaksanakan pada tanggal 10-18 Agustus 2000, PBB berupaya agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali dalam Mukadimah UUD 1945, ketika proses amandemen, namun tidak membuahkan hasil.⁴⁰

Preferensi Umat pada Partai Politik Islam

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Di era-era awal reformasi, PPP termasuk salah satu partai yang cukup konsisten raihan kursinya di DPR dalam pemilu legislatif. Jika ada penambahan maupun penurunan, jumlahnya tidak terlalu banyak atau signifikan. Pada pemilu 1999, misalnya, PPP meraih 58 kursi. Di pemilu 2004, PPP juga meraih jumlah kursi yang sama seperti Pemilu sebelumnya, yakni 58 kursi. Akan tetapi, pada Pemilu 2009, capaian kursi PPP di parlemen mengalami penurunan besar, yaitu hanya 37 kursi. Pemilu 2014, jumlah kursi PPP di DPR bertambah 2, menjadi 39 kursi dengan capaian 8.157.488 suara (6,53%).

Menjelang pemilu presiden tahun 2019, Ketua Umum PPP, M. Romahurmuzy, yang menjadi anggota tim pemenang kubu Jokowi-Ma'ruf, justru ditangkap tangan oleh KPK. Pemberitaan di media massa yang begitu gencar terhadap kasus ini lantas semakin memperburuk citra PPP di mata publik. Tidak mengherankan, di

39. Hamid Basyaib (ed.), "Pengantar", dalam Deliar Noer (et. al.), *Mengapa Partai Islam Kalah*, Jakarta: Alvabet, 1999.

40. Idris Thaha (ed.), *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 157.

pemilu 2019 perolehan kursi PPP mengalami penurunan dengan hanya meraih 6.323.147 suara.

2. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

Di awal kelahirannya, PKB mampu tampil luar biasa dengan berada pada urutan ketiga peraih suara terbanyak dalam pemilu 1999. Jumlah suara yang berhasil diperoleh PKB adalah 13.336.982 suara (12,61%), sehingga mampu mengantarkan para kader PKB menduduki 51 kursi di DPR. Ketua Umum PKB, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dipilih oleh mayoritas anggota MPR sebagai Presiden RI. Sayangnya, kiprah PKB mulai menurun sejak Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kondisi itu diperparah oleh konflik internal di pimpinan PKB, antara Gus Dur dengan Mathori Abdul Djamil. Pemakzulan Gus Dur dari jabatan presiden menjadi pemicu munculnya konflik internal. Mathori sebagai Ketua Umum DPP PKB waktu itu dianggap mengkhianati garis politik partai dan lebih mendukung Ketua Umum DPP PDIP Megawati, yang kemudian menggantikan Gus Dur menjadi Presiden RI. Kemudian, konflik semakin melebar dengan munculnya kepengurusan ganda versi Mathori dan versi Gus Dur. Beruntung, konflik ini tidak berlangsung lama. Seusai peradilan memutuskan PKB pimpinan Gus Dur yang sah di mata hukum, konflik itu pun berakhir.⁴¹

Namun imbas konflik itu membuat citra PKB menjadi sangat buruk. Partai yang dipenuhi tokoh-tokoh spiritual dan menjadi panutan masyarakat ternyata justru saling berseteru satu sama lain untuk urusan-urusan yang bersifat materialistik. Apalagi banyak politisi dan kader PKB yang terjerat kasus korupsi. Sehingga, slogan “membela yang benar” sering diplesetkan menjadi “membela yang bayar”. Sebuah

41. Ichwan Arifin, *Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang*, Tesis, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm. 22-23.

stigmatisasi yang berdampak luar biasa bagi rusaknya citra PKB.⁴² Akibatnya, pada Pemilu 2004, partai yang kemudian dipimpin Alwi Shihab itu hanya memperoleh 10,57% (11.989.564 suara) dan mendapatkan 52 kursi di DPR.⁴³

Citra itu semakin memburuk lagi setelah munculnya konflik baru yang berujung pada perpecahan pasca Muktamar II PKB di Semarang pada tahun 2004. Konflik ini muncul setelah Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf yang saat itu merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB diberhentikan dari jabatannya setelah diangkat menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Imbas dari konflik di Muktamar II Semarang membuat PKB terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Gus Dur-Muhaimin Iskandar berhadapan dengan kubu Alwi Shihab-Saefullah Yusuf.⁴⁴ Perolehan suara PKB merosot tajam pada Pemilu 2009 dan hanya mendapat 27 kursi di DPR.⁴⁵

Penyusutan jumlah kursi ini merupakan konsekuensi dari carut marutnya kondisi partai. Padahal, jika melihat basis massa Nahdhiyyin yang mencapai puluhan juta, partai ini semestinya mampu meraup kursi DPR cukup banyak. Dari sinilah muncul kegamangan sikap politik warga NU yang akhirnya tidak fokus pada satu pilihan partai saja, PKB,

42. Ichwan Arifin, *Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang*, Tesis, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm. 23.

43. nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06041501/pkb-sejarah-dan-kiprahnya-di-lima-kali-pemilu diakses pada Rabu, 28 November 2018 pada jam 11.50 WIB.

44. Ichwan Arifin, *Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang*, Tesis, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm. 24.

45. nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06041501/pkb-ejarah-dan-kiprahnya-di-lima-kali-pemilu, diakses pada Rabu, 28 November 2018 pada jam 11.50 WIB.

melainkan beralih ke partai-partai lain yang dianggap kompeten dan amanah.⁴⁶

Tidak mengherankan jika Firman Noor menyebut, tidak ada partai di Indonesia yang mengalami perpecahan dan melahirkan kepengurusan kembar sebanyak PKB. Begitu juga tidak ada satu pun partai yang menyelenggarakan muktamar atau kongres nasional hingga tujuh kali dalam periode sepuluh tahun keberadaannya. Perpecahan seolah menjadi bagian tak terpisahkan dalam partai ini.⁴⁷

Baru pada pemilu legislatif 2014, raihan suara PKB mengalami kenaikan, dengan jumlah 11.298.957 suara (9,04%). Angka ini menjadikan PKB bertengger di posisi kelima nasional. Pada pemilu legislatif tahun 2019, di bawah komando Muhaimin Iskandar, PKB menunjukkan peningkatan yang signifikan dan meraih suara cukup banyak, yakni sejumlah 13.570.097 suara dan menduduki urutan keempat suara terbanyak setelah PDIP, Gerindra, dan Golkar.

3. Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN termasuk partai yang terus mengalami tren negatif dari segi jumlah pemilih pada era-era awal reformasi. Bagaimana tidak, meskipun dipimpin oleh tokoh yang disebut sebagai Bapak Reformasi, pada pemilu 1999, PAN hanya meraih 7.528.956 suara (7,12%) dengan raihan total 34 kursi di parlemen. PAN menempati urutan kelima dari 48 partai politik yang ikut berkontestasi. Pada pemilu 2004, suara PAN justru mengalami penurunan dengan mengantongi 7.303.324 suara (6,44%) dari total 113.462.414 suara nasional. PAN hanya mampu mengirimkan 53 kadernya di DPR.

46. Ummy Kulsum, "Dinamika Politik PKB (Studi Tentang Konflik Internal 1999-2004)", *Jurnal Mata Budaya* (Vol. 1, Agustus/ 2013), 2.

47. Firman Noor, "PKB, Kegagalan Pelembagaan Shared Values dan Dampaknya", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 2.

Pada pemilu 2009, jumlah capaian suara PAN menurun signifikan dengan pemilih berjumlah 6.254.580 suara (6,01%). Kursi dewan yang berhasil diduduki oleh kader PAN sebanyak 43 kursi. Meski secara kuantitas jumlah suara dan kursi PAN menurun, peringkat PAN mengalami kenaikan di urutan kelima, naik dua strip daripada pemilu 2004 dimana PAN berada di peringkat ketujuh.

PAN meraih tambahan suara cukup banyak di pemilu legislatif 2014 dengan angka 9.481.621 suara (7,59%), menempatkannya pada urutan keenam suara terbanyak nasional. Sejumlah 49 kursi berhasil diduduki oleh anggota DPR dari Fraksi PAN. Namun, pada saat yang sama, di pemilihan presiden 2014, perwakilan PAN, Hatta Rajasa, yang maju sebagai cawapres kalah melawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pada pemilu legislatif 2019, raihan suara PAN terbilang stagnan dan tidak banyak mengalami penambahan dengan 9.572.623 suara. Bahkan, apabila dibandingkan dengan jumlah suara sah nasional, persentase suara PAN hanya 6,84%, sehingga membawa PAN turun ke urutan delapan peraih suara terbanyak dari 16 partai politik peserta pemilu. Ini menunjukkan bahwa suara PAN berpotensi tergerus pada era yang akan datang, jika tidak ada perbaikan internal oleh partai.

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Di pemilu 1999, cikal-bakal PKS, yaitu Partai Keadilan (PK) hanya meraih 1.436.565 suara (1,36%) dengan 7 kursi di DPR. Pada pemilu 2004, terjadi lonjakan suara signifikan pada PKS dengan 7,34% atau 45 kursi di DPR, yang mencengangkan banyak pihak. Bahkan, pada waktu itu PKS mendapat julukan baru dari para pengamat sebagai "*rising star*". Hal ini tidak lepas dari kiprahnya di dunia politik yang dikenal sebagai partai yang bersih dan memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas KKN. Komitmen itu bukan

hanya janji tetapi juga dengan bukti melalui perilaku dan sikap para kadernya yang duduk di lembaga perwakilan (DPR dan DPRD).⁴⁸

Di pemilu legislatif 2009, peringkat PKS menanjak pesat dengan berada di urutan keempat dengan 8.206.955 suara (7,88%). Capaian ini menjadikan PKS mampu membawa kadernya menduduki 57 kursi di DPR, atau naik 12 kursi dibandingkan pada pemilu lima tahun sebelumnya. Namun, menjelang pemilu 2014, PKS mendapatkan “tantangan” pasca kasus korupsi suap impor daging yang menimpa Ketua Umum PKS, Lutfi Hasan Ishaq. Meski demikian, capaian PKS di Pemilu 2014 lalu jauh dari prediksi sejumlah lembaga survei. PKS yang diprediksi jeblok dan tidak mampu lolos *parliamentary threshold* justru memperoleh hasil yang cukup baik. Walau jumlah suara menurun, PKS masih mendapat 8.480.204 suara (6,79%) dan berhasil menempatkannya di urutan ketujuh suara terbanyak di tingkat nasional.⁴⁹

Signifikansi suara yang menjungkirbalikkan prediksi disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, kuatnya vitalitas sistem PKS. PKS berhasil mempertahankan suara di tengah badai lantaran faktor kaderisasi yang baik, soliditas kader, dan kinerja di lapangan. *Kedua*, terkait virtualitas politiknya. Hasil survei Awesometric di berbagai media menunjukkan bahwa PKS adalah partai politik yang paling disebutkan (*the most mentioned*). PKS dilaporkan lebih dari 213 ribu kali pada arus utama dan media sosial selama periode sebelum Pemilu 2014. Posisi kedua adalah Partai Demokrat dengan 203.247 kali, disusul oleh Partai Golkar, Gerindra, dan PDIP.⁵⁰

48. Lili Romli, “Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 1, No. 1, 2004, hlm. 44.

49. Lembaga-lembaga survei yang memprediksi PKS tidak mampu mencapai ambang batas parlemen sebesar 3,5% di antaranya CSIS (2,7%), Tim Pusat Data Bersatu (1,1%), Focus Survei Indonesia (2,9%), LSI (4,1%), PolTracking Institute (2,9%), Charta Politika (3,1%), dan Litbang Kompas (2,3%).

50. Khoiruddin Muchtar dan Aliyudin, “Public Relation Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat”, *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 78-79.

Ketiga, terkait kecerdasan dan konsistensi perjuangannya. Kampanye PKS selama pemilu dipandang publik cukup atraktif dan kreatif, baik di media maupun lapangan. Isu yang diangkat juga beragam. Hal ini menunjukkan kecerdasan pengkaderan politik oleh PKS. Capaian ini didukung oleh kader PKS yang sebagian besar berpendidikan tinggi.⁵¹

Pada Pemilu 2019, suara yang diperoleh PKS cukup banyak, dengan 11.493.663 suara, dan berhasil menempatkan PKS pada urutan keenam suara terbanyak. Ini menunjukkan bahwa PKS semakin menunjukkan *trend* positif dan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat pemilih. Nampaknya, basis massa PKS telah mengalami perkembangan pesat, tidak hanya dari kalangan terdidik kampus.

5. Partai Bulan Bintang (PBB)

Dari seluruh partai Islam, dapat dikatakan, PBB merupakan partai yang menjalani perjuangan terberat dalam berkiprah di dunia politik. Pada pemilu 1999, PBB berada di urutan keenam dengan jumlah 2.049.708 suara (1,94%), setara 13 kursi di parlemen. Lima tahun berikutnya, pada pemilu 2004, suara PBB naik menjadi 2.970.487 suara (2,62%) dan menempatkannya di peringkat kedelapan di level nasional.

Pemilu 2009 menjadi cikal bakal ketergerusan PBB dalam partisipasi politiknya di parlemen. PBB hanya mampu meraup 1.864.752 suara (1,79%). Dengan demikian, PBB tidak memenuhi *parliamentary threshold* (2,5%), sehingga tidak memperoleh kursi di DPR. Di pemilu 2014, PBB mendapatkan ganjalan karena tidak lolos verifikasi faktual, meski sebelumnya pada verifikasi awal dan administratif dinyatakan lolos. Hingga pada akhirnya PBB berhasil menjadi peserta pemilu legislatif setelah gugatannya dikabulkan

51. Khoiruddin Muchtar dan Aliyudin, "Public Relation Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat", *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 79.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Suara yang berhasil diraih tidak cukup untuk mengantarkan PBB melewati ambang batas parlemen, karena hanya mendapat 1.825.750 suara (1,46%). Di pemilu legislatif 2019, PBB juga dihadapkan pada persoalan hasil verifikasi faktual yang membuatnya terganjal di awal menjelang pemilu. Raihan suara yang didapatkannya juga tidak begitu banyak, hanya 1.099.848 suara.

Dinamika Relasi dan Kontestasi Partai Politik Islam

Hubungan antara satu parpol Islam dengan parpol Islam lainnya dapat dikatakan mengalami dinamika yang cukup unik. Sebab, pada satu era, terdapat momen ketika parpol Islam membuat koalisi dengan sesama parpol Islam, namun pada waktu yang lain berkompetisi dan bersaing dalam meraih suara rakyat. Di level nasional, dalam pemilihan presiden tahun 2019, misalnya, PKS dan PAN berkoalisi dalam memenangkan pasangan Prabowo-Sandi bersama Partai Gerindra dan Partai Demokrat serta Partai Berkarya, sementara PKB, PPP, dan PBB lebih memilih menyukseskan kubu petahana Jokowi-Ma'ruf Amin bersama dengan partai-partai nasionalis lain, seperti PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo.

Padahal, pada pilpres 2014, seluruh parpol Islam kecuali PKB, yakni PKS, PAN, PPP, dan PBB berkoalisi untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Adapun PKB memberikan dukungannya kepada Jokowi-Kalla. Saat itu, kubu Prabowo-Hatta diusung Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, dan satu partai pendukung, Demokrat. Sementara kubu Jokowi-Kalla diusung oleh PDIP, Hanura, PKB, Nasdem, dan didukung oleh PKPI.

Dalam pilpres 2009, terdapat 3 pasangan yang berkontestasi dalam mengisi kursi presiden dan wakil presiden, yaitu: (1) Megawati-Prabowo, (2) SBY-Boediono, dan (3) Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan Megawati-Prabowo diusung

oleh PDIP dan Gerindra, dan sejumlah partai pendukung, antara lain Partai Kedaulatan, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, PSI, dan Partai Merdeka. Adapun parpol-parpol Islam “bersepakat” mengusung pasangan SBY-Boediono bersama dengan Partai Demokrat. Parpol Islam yang dimaksud antara lain PKS, PAN, PKB, dan PPP, beserta 18 partai pendukung.⁵² Sementara pasangan Jusuf Kalla-Wiranto diusung oleh Partai Golkar dan Hanura, serta 1 partai pendukung, yakni PDK.

Pada 2004, pilpres dilakukan dalam dua kali putaran. Putaran pertama, 5 Juli 2004, diikuti oleh 5 pasangan capres dan cawapres, yaitu: (1) Wiranto-Salahuddin Wahid yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Patriot Pancasila, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI); (2) Megawati-Hasyim Muzadi yang diusung PDIP dan Partai Damai Sejahtera; (3) Amien Rais-Siswono Yudo Husodo yang diusung PAN, PKS, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), PNI Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Serikat Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO); (4) SBY-Jusuf Kalla yang diusung Partai Demokrat, PBB, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); (5) Hamzah Haz-Agum Gumelar yang diusung hanya oleh satu parpol, yaitu PPP.⁵³

Pada putaran kedua, dua pasangan dengan suara terbanyak berkontestasi menuju kursi presiden dan wakil presiden, yaitu Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla. Pada putaran kedua ini, koalisi partai mengalami dinamika. Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi mendapatkan tambahan

52. Partai pendukung yang berjumlah 18 itu antara lain PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai Republikan, PNBK, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PPIB, PPNUI, dan PPDI.

53. Muhadam Labodo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, Isu Strategis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 160

dukungan dengan bergabungnya Golkar, PPP, dan PBR. Sementara kubu SBY-Jusuf Kalla mendapatkan “amunisi” tambahan dengan masuknya PKB, PKS, dan PAN. Putaran kedua ini kemudian dimenangkan oleh pasangan SBY-Jusuf Kalla dengan persentase keunggulan 60,62% dibanding Megawati-Hasyim Muzadi yang meraih 39,38% suara.

Adapun pada pemilu tahun 1999 yang penentuan presiden dan wapresnya belum memakai format pemilihan langsung oleh rakyat, PDIP keluar sebagai partai dengan suara rakyat terbanyak dengan raihan 35.689.073 suara, kemudian secara berturut-turut diikuti oleh Golkar di urutan kedua, PKB di urutan ketiga, PPP di posisi keempat, dan PAN pada posisi kelima. Presiden dan wakil presiden kemudian dipilih oleh MPR berselang 4 bulan setelah pemilu legislatif, yang kemudian memunculkan nama Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati menjadi wakilnya.

Semenjak awal reformasi hingga saat ini, jika menilik *track record* pilihan politik parpol Islam, koalisi seluruh parpol Islam dalam satu kubu hanya terjadi ketika pemilu tahun 2009, di mana saat itu parpol Islam mendukung petahana, pasangan SBY-Boediono. Pada waktu itu, pihak petahana mampu unggul signifikan dengan persentase 60,8% hanya dalam satu putaran. Ini berarti kemenangan yang diraih SBY-Boediono relatif mutlak jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, tahun 2004, yang diselenggarakan sebanyak 2 kali putaran. Apalagi pilpres selain 2009 itu yang kemenangan pihak capres dan cawapres terpilihnya tidak mampu mencapai 60%.

Di luar pemilu tahun 2009, parpol Islam tidak pernah satu suara dalam mendukung satu kubu calon presiden dan wakil presiden. Hal ini boleh jadi ditengarai karena parpol Islam masih belum yakin dengan perhitungan dan prediksi masing-masing terkait jumlah dukungan masyarakat terhadap kandidat yang didukungnya. Dengan demikian, tiap parpol

Islam meyakini bahwa pasangan yang didukungnya tetap memiliki kesempatan untuk bisa melenggang ke kursi presiden dan wapres. Atau, sekurang-kurangnya kepentingan mereka dapat diakomodir oleh pihak yang mereka *support*.

Dari sini tampak jelas bahwa dukungan parpol Islam terhadap parpol lain yang mengusung calon presiden dan wakil presiden lebih disebabkan oleh adanya kepentingan politik praktis dalam meraih kekuasaan di pemerintahan. Langkah tersebut diambil oleh parpol Islam boleh jadi karena mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Untuk mewujudkan idealisme, visi, dan cita-citanya, parpol Islam perlu mendapat jatah kekuasaan eksekutif di pemerintahan. Sementara itu, cara yang paling logis untuk bisa meraih hal tersebut ialah dengan bergabung kepada pihak yang potensial menang.
2. Berkoalisi dengan parpol potensial dapat mendongkrak raihan suara yang memilih partai serta calon legislatifnya, sehingga jumlah kursi di DPR yang diperoleh partai Islam juga akan mengalami peningkatan.

Pilihan Umat: Substansi di atas Label

Kemenangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang duduk menjadi presiden RI keempat, meski saat itu partai peraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif adalah PDIP, menjadi salah satu bukti bahwa apabila seluruh partai Islam bersatu, maka mereka akan berhasil mengusung kandidatnya sebagai presiden Indonesia. Jika menilik dinamika politik tahun 1999, di mana Megawati yang dicalonkan partainya berkeyakinan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki kursi mayoritas penuh di legislatif, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli tahun 1999, Amien Rais yang merupakan pendiri PAN membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai

Islam. Poros Tengah mulai menggulirkan ide pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Setelah itu, komitmen PKB pun terhadap pencalonan Megawati mulai berubah.⁵⁴

Pada 7 Oktober 1999, Poros Tengah secara resmi menyatakan dukungan kepada Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden Indonesia keempat. Beberapa tokoh, seperti Akbar Tanjung (Ketua DPR) dan Amien Rais (Ketua MPR), menyatakan akan mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR bersidang dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid yang didukung oleh Poros Tengah kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia dengan perolehan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.⁵⁵

Meski tidak bisa dimungkiri bahwa keberhasilan Gus Dur menduduki kursi presiden berkat andil dari koalisi partai-partai Islam, namun sebenarnya faktor personal dari Gus Dur ialah unsur penting yang tidak dapat diabaikan. Gus Dur yang merupakan pimpinan PBNU dikenal sebagai kyai kharismatik, berpengetahuan luas, pemikir, dan aktivis perdamaian lintas agama. Artinya, keberadaan sosok Gus Dur ini yang menjadi pemantik penyatuan suara di kalangan tokoh-tokoh politik, karena ia dihormati semua kalangan, terutama dari umat Islam.

Penutup

Dari seluruh penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa kekalahan partai politik Islam dalam pemilu disebabkan, karena:

1. Partai-partai Islam tidak pernah bersatu dalam arti yang sebenarnya. Sering terjadi, satu partai Islam lebih akrab

54. Greg Barton, *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Jakarta: LKiS, 2002, hlm. 275.

55. J.F. Conceicao, *Indonesia's Six Years of Living Dangerously*, Singapore: Horizon Books, 2005, hlm. 9.

program dan orientasi politiknya dengan satu partai non Islam. Sedangkan partai Islam yang lain lebih akrab dengan partai non Islam yang lain pula. Dalam Pilpres 2019 kemarin sebagai contoh, PKS dan PAN berkoalisi dengan Gerindra dan Demokrat. Sedangkan partai Islam lain, PPP, PKB, dan PBB berkoalisi dengan PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Koalisi berbagai parpol Islam lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik partai dalam meraih kekuasaan.

2. Partai-partai Islam di Indonesia belum pernah sepakat untuk memercayakan kepemimpinan perjuangan Islam kepada seorang tokoh sentral yang ditaati oleh semuanya, kecuali pada pemilihan presiden tahun 1999. Setelah itu, belum ada tokoh kharismatik yang dipercaya oleh seluruh petinggi partai-partai Islam untuk berjuang bersama dalam satu suara.
3. Pemilih dari kalangan umat Islam tidak lagi mempertimbangkan aspek formalistik partai dengan label Islam saja, melainkan justru menilai program kerja dan kualitas kinerja anggota dewan yang mewakili partai di parlemen. Maka, parpol Islam yang memiliki program kerja realistis dan aspiratif, yang didukung dengan kader yang amanah, akan mampu berkembang dan menambah jumlah basis massa pendukung di era mendatang.

Sebelum mengakhiri orasi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada semua pihak yang telah membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga saya berhasil mencapai puncak karier sebagai dosen dengan memperoleh gelar Profesor. Rasa terima kasih terutama saya panjatkan kepada Allah SWT dengan ucapkan *Alhamdulillah* *rabbil 'alaamiin*, dan kepada Rasulullah SAW dengan ucapkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Kemudian rasa terima kasih, saya sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya, (alm) Bapak KH. Abdullah Kholil dan (alm) Ibunda Hj. Siti Rofi'ah, serta Kedua mertua saya, (alm) Bapak H. Imam Sunardi dan Ibu Hj. Sulbiyah.
2. Istri saya, Dra. Hasna Sri Rohmani, serta anak-anak dan saudara-saudara saya, baik dari jalur saya maupun dari jalur istri saya.
3. Bapak Dr. H.Zaenal Mustakim, M.Ag, rektor IAIN Pekalongan periode 2021-2024.
4. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, Rektor IAIN Pekalongan periode 2017-2021, Ketua STAIN Pekalongan periode 2014-2017, dan periode 2010-2014.
5. (Alm) Bapak Drs. Sudaryo El-Kamali, MA, Ketua STAIN Pekalongan, periode 2005-2010.
6. Bapak Drs. H. Rozikin, MAg, Ketua STAIN Pekalongan, periode 1997-2001, dan 2001-2005.
7. Guru-guru saya, terutama Bpk. KH. Anis Wahdi, Bpk. Drs. KH. Moh. Asyiq, (alm) Bpk. K. Kholil Abdurrozak, (alm) Bpk. KH. Omar Kholil, Bpk. KH. Mukhlas, (alm) Bpk. Drs. Muslih Maruzi, (alm) Bpk. Drs. Ibnu Jarir, Bpk Drs. Iing Misbahudin, Lc., MA; (alm) Bpk. Prof. Dr. Amin Syukur, MA., (Alm) K. Amari, guru ngaji saya waktu kanak-kanan, dan sahabat saya, Prof. Dr. Teguh Budiharso, M.Pd. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dan sangat berkesan di hati saya.
8. Teman-teman saya sekantor yang membantu sebagian tugas dan tanggung jawab saya sebagai Direktur Pascasarjana (periode 2012-2015 dan 2017-2021), yaitu: Dr. Imam Khanafi, Dr. Susminingsih, Dr. Slamet Untung, Dr. Ali Trigiyatno, Dr. Ali Muhtarom, (Alm) Dr. Umum Budi Karyanto, H. Abdul Manan, SH; Zuhair Abdullah, M.Pd; Ahmad Subiyadi, MA; Moch. Achwan Baharuddin, M.A; Dr. Taufiqurrahman, Agung Risdiyanto; Murip, Lutfi, Ridloka fi Syauqi, dan Rifqi. Begitu pula teman-teman saya waktu saya

menjadi Ketua P2M (periode 2015-2017), terutama mas Yusuf Nalim, M.Sc., Muzayin, dan Hasanudin. Juga teman-teman sewaktu saya menjadi Kepala Perpustakaan (periode 2006-2012), terutama Mbak Junaeti, Mbak Fatonah, dan Mbah Izzah.

Hadirin, para tamu undangan yang berbahagia,

Sebelum mengakhiri orasi ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang empat lilin yang sedang menyala. Sedikit demi sedikit meleleh. Suasana menjadi sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin yang *pertama* berkata, “Aku adalah lilin **Perubahan**. Namun manusia tidak mau berubah, maka lebih baik aku matikan diriku saja.” Sedikit demi sedikit Lilin pertama ini pun padam.

Lilin yang *kedua* berkata, “Aku adalah lilin **Iman**. Sayang, aku tidak berguna lagi. Manusia tidak mau mengenaliku. Untuk itu, tidak ada gunanya aku tetap menyala.” Begitu selesai berbicara, tiupan angin memadamkannya.

Dengan sedih, giliran Lilin yang *ketiga* berbicara, “Aku adalah lilin **Cinta**. Tidak mampu lagi aku menyala, karena manusia tidak lagi menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci sesama saudara muslim.” Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah Lilin ketiga.

Tanpa terduga, seorang anak masuk ke dalam kamar, dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena anak itu takut kegelapan, maka ia berkata, “Eeeh, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut kegelapan.” Anak itu pun menangis tersedu-sedu. Lalu dengan haru, lilin *keempat* berkata, “Jangan takut, jangan menangis, sayang. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat menyalakan ketiga lilin lainnya. Aku-lah lilin **Harapan**.”

Dengan mata berkaca-kaca, sang anak mengambil lilin **Harapan**, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya.

Dari kisah keempat lilin ini, kita dapat mengambil pelajaran. Apa yang tidak pernah mati adalah **Harapan** yang ada di dalam hati. Masing-masing kita dapat menjadi aktor, seperti sang anak tadi, yang dalam situasi apa pun mampu menghidupkan kembali Iman, Cinta, dan Perubahan, dengan Harapannya.

Hadirin, kita semua adalah harapan. Di tangan kita ada harapan. Di pikiran kita ada impian, dan di hati kita ada masa depan. Silahkan tantangan menghadang, silahkan rintangan menghalang, silahkan hambatan membentang, saya akan terus mengalir mencapai harapan masa depan sampai titik darah penghabisan..

Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud dari tercapainya harapan dan untuk mengakhiri orasi ilmiah ini, saya ingin menyampaikan dua buah pantun:

Pemuda desa merantau dengan menjual es
Anaknya cerdas, santun, dan andap asor
Dari sembilan belas orang yang dulu lolos CPNS
Baru saya seorang yang sudah menjadi profesor
Naik perahu menuju ke haluan
Serombongan orang berkumpul menghadap konsul
Alhamdu lillah saya sudah profesor duluan
Semoga reman-teman lainnya segera menyusul

Demikian, terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekhilafan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ichwan, *Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang*, Tesis, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Asyari, Suaidi, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Balda, Syamsul, *Politik Dakwah Partai Keadilan*, Jakarta: DPP Partai Keadilan, 2000.
- Barton, Greg, *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Jakarta: LKiS, 2002.
- Basyaib, Hamid (ed.), "Pengantar", dalam Deliar Noer (*et. al.*), *Mengapa Partai Islam Kalah*, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Basyir, Ach., "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Conceicao, J.F., *Indonesia's Six Years of Living Dangerously*, Singapore: Horizon Books, 2005.
- Eklof, Stephen, *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order (1986-98)*, London: Routledge, 2004.
- Eksan, Moch., *Kiai Kelana: Biografi Kiai Muchith Muzadi*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2000.
- Furkon, Aay Muhamad, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Kontemporer*, Jakarta: Teraju, 2004.

- Gerald, Galang, "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI, dan Islam Fundamentalisme di PKS", *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan, "Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014", *Journal of Governance*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Muchtar, Khoiruddin dan Aliyudin, "Public Relation Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat", *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Noor, Firman, "PKB, Kegagalan Pelembagaan Shared Values dan Dampaknya", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfare, 2012.
- Romli, Lili, "Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 1, No. 1, 2004.
- Sahasrad, Herdi, *PKS dan Kepemimpinan Islam Era Depan*, Jakarta: PSIK Paramadina, 2008.
- Salim, Hairus (ed.), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999.
- Thaha, Idris (ed.), *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Kajian Lanskap Indonesia, *Manifesto PKB: Melayani Ibu Pertiwi*, t.tp., t.th.
- Wahid, Salahuddin, *Menggagas Peran Politik NU*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.

Internet:

<http://pan.or.id/sejarah-pan/>, diakses pada 30 September 2020, jam 15.11 WIB.

<https://fixpadang.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-40797326/ruu-cipta-kerja-ditolak-jadi-uu-oleh-fraksi-pks>, diakses , diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.34 WIB.

<https://fraksi.pks.id/2020/07/02/pendapat-akhir-mini-fraksi-pks-dpr-ri-terhadap-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/>, diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.45 WIB.

<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3164951/progresif-usulan-revisi-ite-dari-fraksi-pan-dan-pks>, diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.20 WIB.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191205061023-32-454286/pks-dorong-ruu-perlindungan-ulama-masuk-prolegnas-prioritas>, diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.25 WIB.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200624122551-32-516863/fraksi-pan-desak-pimpinan-dpr-cabut-ruu-hip-dari-prolegnas>, diakses pada 3 Oktober 2020, jam 15.30 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06041501/pkb-sejarah-dan-kiprahnya-di-lima-kali-pemilu> diakses pada Rabu, 28 November 2018 pada jam 11.50 WIB.

<https://nasional.tempo.co/amp/1358595/pks-dan-pan-anggap-usulan-ubah-ruu-hip-ke-ruu-pip-tak-relevan>, diakses pada 5 Oktober 2020, jam 19.25 WIB.

<https://pkb.id/page/naskah-deklarasi/> diakses pada Rabu, 28 November 2018 pada jam 11.31 WIB.

<https://pks.id/content/ad-art-pks>, pada 31 Agustus 2020 jam 10.41 WIB.

<https://ppp.or.id/visimisi>, diakses pada 31 Agustus 2020 jam 10.44 WIB.

<https://www.acehtrend.com/2020/09/23/dpr-usulkan-hapus-pasal-150-ayat-3-ruu-cipta-kerja-yang>

berpotensi-merugikan-keuangan-negara/, diakses pada 3 Oktober 2020, jam 15.35 WIB.

<https://www.partaibulanbintang.or.id/visi-dan-misi-partai.html>, diakses pada 31 Agustus 2020 jam 10.28 WIB.

<https://www.pkb.id/page/visi-misi/> dan <https://www.pkb.id/page/asas-prinsip/>, diakses pada 31 Agustus 2020 jam 11.05 WIB.

<https://www.pppjatim.or.id/khitthah-dan-program-perjuangan/>, diakses pada 16 September 2020, pukul 16.35 WIB.

<https://www.pppjatim.or.id/khitthah-dan-program-perjuangan/>, diakses pada 16 September 2020, pukul 16.35 WIB.

TENTANG PENULIS

Nama : **Makrum Kholil**
Tempat/Tgl Lahir : Demak, 21 Juni 1965
Alamat : Jl. Banowati No. 5. Perum. GPI
Pekalongan Utara, Kp. 51115,

Riwayat Pendidikan:

1. SDN di Karangrejo, Bonang, Demak (1977).
2. Madrasah Diniyah Matsmaratul Huda di Gagatan, Karangrejo, Bonang, Demak (1977).
3. MI Khoiriyah di Waturoyo, Margoyoso, Pati (1978).
4. SMP PGRI Margoyoso, Pati (1981).
5. MTs Khoiriyah di Waturoyo, Margoyoso, Pati (1981).
6. Pond. Pes. Djannatul Huda di Cebolek, Margoyoso, Pati (1978 s.d 1981).
7. MA NU di Demak (1984).
8. Pond.Pes. al-Fattah di Bintoro, Demak (1981 s.d 1984).
9. S1, Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (1989).
10. S2, Jur. Dirasah Islamiyah, IAIN SU Medan (1998).
11. S3, Konsentrasi Syari'ah, UIN Syahid, Jakarta (2008).
12. Postdoc UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)

Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen Honorer di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (1990 s.d 1992).
2. CPNS (III/a), di IAIN Pekalongan (1992 s.d 1994).
3. Penata Muda (III/a) dan Tenaga Pengajar, di IAIN Pekalongan (1994).
4. Penata Muda (III/a), Asisten Ahli Madya, di IAIN Pekalongan (1995 s.d 1997).

5. Penata Muda Tk. I (III/b), Asisten Ahli, di STAIN Pekalongan (1997 s.d 1999).
6. Penata (III/c), Lektor Muda, STAIN Pekalongan (1999 s.d 2001).
7. Penata Tk. I (III/d), Lektor Madya, STAIN Pekalongan (2001 s.d 2004).
8. Pembina (IV/a), Lektor Kepala, di STAIN Pekalongan (2004 s.d 2009).
9. Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala, di STAIN Pekalongan (2009 s.d 2012).
10. Pembina Utama Muda (IV/c), Lektor Kepala, di STAIN Pekalongan (2012 s.d 2021).
11. Pembina Utama Madya (IV/d), Guru Besar, di IAIN Pekalongan (2022)

Riwayat Jabatan Struktural

1. Kepala Perpustakaan (Oktober 2006 s.d Maret 2012).
2. Direktur Pascasarjana STAIN Pklongan (April 2012 s.d Maret 2015).
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (P2M) (April 2015 s.d Maret 2017).
4. Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan (April 2017 s.d Maret 2021).

Keterlibatan / kegiatan sosial :

1. Mengisi khutbah di beberapa masjid
2. Mengisi pengajian di kantor dan majlis ta'lim.
3. Memberi ceramah di kantor dan lembaga swasta
4. Menjadi narasumber di beberapa kampus

Karya ilmiah:

1. *Fiqh Ibadah* (Diktat).
2. *Sejarah Peradilan Islam* (Diktat).

3. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Diktat).
4. *Teologi Rasional Muhammad Abduh*, Buku (CV. Misaka Galiza).
5. *Kontribusi Ilmuwan Muslim bagi Kelahiran Sains Modern* (Jurnal Teologia)
6. *Averroisme: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Renaissans* (Pena Unikal, Pekalongan) Misykatul Anwar, Universitas Muhammadiyah Jakarta
7. *Lembaga Majlis Tarjih Muhammadiyah: Hukum Islam Menurut Visi Kaum Modernis Indonesia* (Jurnal Hukum Islam).
8. *Umara' dan Hukum Dalam Islam* (Jurnal Media Dakwah).
9. *Komunikasi Massa Dalam Perspektif al-Qur'an* (Jurnal Media Dakwah).
10. *Inabah: Obat Narkoba versi Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah* (Religia)
11. *Kaidah Fiqhiyah Dalam Lintasan Sejarah* (Religia).
12. *Keautentikan al-Qur'an: Hubungan dengan Sifat Ke-Ummian Nabi SAW* (Jurnal Hukum Islam)
13. *Hadits-hadits Politik Abad Pertengahan Islam: Suatu Kajian Sosiologis* (Religia).
14. "Politik Islam Gokar di Masa Orde Baru," *Religia*.
15. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Muhammad Husain Haikal," *Religia*.
16. "Teologi Rasional: Telaah atas Pemikiran Kalam Muhammad Abduh," *Jurnal Ilmiah Ulumuna*, IAIN Mataram.
17. *Dinamika Politik Islam GOLKAR di Era Orde Baru*, Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.
18. *Relasi Islam dan Politik* (IAIN SU Medan Press)
19. "Jihad: Akar Ideologi Terorisme (?)," dalam *Prosiding*, Citapusaka Media Perintis <http://febi.iain-surakarta.ac.id/proceeding-icies/>;

20. "Tracing the Historical and Idiological Roots of ISIS: Shi'ite or Sunni?," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 6, Number 2, December 2016, ISSN 2089-1490, e-ISSN 2406-825X, Jurnal Internasional IAIN Solotigo;
21. "Poligami dalam Perspektif al-Qur'an," *Maghza*, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2016, ISSN 2528-6773;
22. "Voting For Non-Muslim Leaders in The Qur'an Perspective," dalam *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol 14, No 2 (2019), LP2M IAIN Tulungagung;
23. "Hajj, Its Islamic Perspective, Management and Role of Supply Chain in Indonesian Perspectives," *International Journal of Supply Chain Management*, ISSN: 2050- 7399 (Online), 20513771 (Print), 9th February 2020 (Volume 9, No. 1, 2020). indexed in Scopus (Elsevier), DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Scirus, GetCited, Scribd, Citeseerx, Newjour and so on.
24. "Terrorism in the Name of Jihad: the Perspective of Maqâshid Sharî'ah;" *International Journal of Supply Chain Management*, ISSN: 2050- 7399 (Online), 20513771 (Print), 9th February 2020 (Volume 9, No. 1, 2020). indexed in Scopus (Elsevier), DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Scirus, GetCited, Scribd, Citeseerx, Newjour and so on.
25. "Certification for Small Scale Products: Review of Fiqh Rules and Sharia Maqasid," *RIGEO*, ISSN: 2146-0353 • © RIGEO • 10(4), WINTER, 2020
26. "Perangkap Dosa Pemimpin Institusi" dalam Mek Wok Mahmud dkk., *Dosa-Dosa Akhir Zaman*, Kuala Lumpur: CENTRIS IIUM, 2021. .
27. "NU dalam Perebutan Kekuasaan: Dinamika Politik Elektoral Warga Nahdliyin pada Pilpres 2019," dalam Aksin Wijaya, *Berislam di Jalur Tengah: Dinamika*

Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan Kontemporer, Percikan Pemikiran Para Direktur Pascasarjana PTKIN Indonesia, Yogyakarta: IRCiSoD , 2020.

28. "Medical risk products: certification by Majelis Ulama Indonesia," *Economic Annals-XXI*, 188(3-4), 104-110. doi: <https://doi.org/10.21003/ea.V188-12>.
29. "Moderasi Beragama dalam Bidang Politik," akan diterbitkan oleh IAIN Pekalongan dalam kumpulan buku, *Moderasi Beragama*.

Penelitian:

1. Pemerintahan Islam Menurut Muhammad Husain Haikal (Ditbinperta Depag).
2. Pondok Pesantren Darussalam Gontor Sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Umat (Ditbinperta Depag).
3. Sumber Konflik NU-Muhammadiyah dan Solusinya (Ditbinperta Depag).
4. Partai Demokrat: Strateginya dalam Meraih Dukungan Rakyat pada Pemilu 2004 (Ditbinperta Depag).
5. Golkar: Peranannya dalam Mengakomodasi Aspirasi Umat Islam (STAIN Pekalongan)
6. Hubungan Islam dan Politik (Studi atas Respon Intelektual Muslim di Pekalongan Terhadap Negara Islam Indonesia (STAIN Pekalongan)
7. Persepsi Ulama Pekalongan Terhadap Perbankan Syari'ah (STAIN Pekalongan)

Partai-partai politik Islam di Indonesia tidak pernah memperoleh kemenangan dalam setiap pemilu, sehingga tidak pernah secara mutlak berkuasa. Meskipun jumlah umat Islam mendekati 90 % dari rakyat Indonesia, tetapi ternyata tidak semuanya menyalurkan aspirasi politik mereka melalui partai-partai Islam. Selain itu, hubungan antara satu parpol Islam dengan parpol Islam lainnya dapat dikatakan mengalami dinamika yang cukup unik. Sebab, pada satu era, terdapat momen ketika parpol Islam membuat koalisi dengan sesama parpol Islam, namun pada momen lain berkompetisi dan bersaing dalam meraih suara rakyat. Akibatnya, pemilih dari kalangan umat Islam tidak lagi mempertimbangkan aspek formalistik partai dengan label Islam saja, melainkan justru menilai program kerja dan kualitas kinerja anggota dewan yang mewakili partai di parlemen. Maka dalam pengembangan keilmuan pemikiran politik Islam, parpol Islam yang memiliki program kerja realistis dan aspiratif dengan didukung kader yang amanah, akan mampu berkembang dan menambah jumlah basis massa pendukung di era mendatang pasca reformasi.